

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Sistem Pembiayaan Pendidikan

#### 1. Hakikat Pembiayaan Pendidikan

Biaya dalam bahasa Inggris menggunakan istilah *cost*, *financial*, *expenditure*. Biaya menurut Usry dan Hammer dalam Akdon adalah sebagai *cost as an change, a forging, a sacrifice made to secure benefit*. *Cost* sinonim dengan *expense* yang digunakan untuk mengukur pengeluaran (*outflow*) barang atau jasa yang disandingkan dengan pendapatan untuk mengukur pendapatan.<sup>1</sup>

Biaya dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pengeluaran dalam satuan mata uang yang dikorbankan untuk memperoleh atau menghasilkan sesuatu. Dengan kata lain, terdapat 4 (empat) unsur pokok dalam biaya, yaitu: 1) merupakan pengorbanan sumber ekonomi; 2) diukur dalam satuan uang; 3) telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi; dan 4) pengorbanan untuk tujuan tertentu.<sup>2</sup>

Adapun menurut Yahya dalam Mulyono tentang konsep biaya pendidikan menyatakan bahwa biaya pendidikan merupakan suatu unsure yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara fisien dan efektif.<sup>3</sup>

Kegiatan pembiayaan adalah usaha memperoleh modal untuk membiayai aktifitas yang dilakukan. Dalam buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah

---

<sup>1</sup> Akdon, etc all., *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015),5

<sup>2</sup> Ferdi WP., *Pembiayaan Pendidikan Suatu Kajian Teoritis*, (Jakarta: Puslitjak, Balitbang, kemendikbud, 2011) 568

<sup>3</sup> Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media Grup, 2010),81

istilah pembiayaan meliputi penyiapan anggaran, penatausahaan, perpajakan, pengelolaan, pelaporan keuangan yang telah dilaksanakan untuk dikomunikasikan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait. Sehingga manajemen keuangan merupakan pengendalian atas fungsi-fungsi keuangan yaitu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi.<sup>4</sup>

Menurut Langevell pendidikan adalah memanusiakan manusia. Dan menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect) dan tubuh anak.<sup>5</sup> Selanjutnya dalam Retnanto Ki Hajar Dewantoro menyatakan” Pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak- anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak- anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi- tingginya. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu, atau pengetahuan, serta juga memberikan kecakapan pada anak- anak. Pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan.”<sup>6</sup> Pendidikan merupakan pergaulan manusiawi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa dengan memiliki nilai- nilai kemanusiaan dan hidup menurut nilai- nilai tersebut.

Mulyasa menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan secara keseluruhan menuntut kemampuan suatu lembaga pendidikan atau sekolah untuk

---

<sup>4</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian agama, *Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/ Madrasah*, 162

<sup>5</sup>Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 13

<sup>6</sup>Agus Retnanto, *Sistem Pendidikan Islam Terpadu*,( Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2014), 18

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan secara efektif dan transparan.<sup>7</sup>

Maka bisa disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah aktivitas yang berkenaan dengan usaha untuk memperoleh dana yang dipergunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan.

## 2. Sistem Pembiayaan Pendidikan

Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem berasal dari bahasa Latin *systema* dan bahasa Yunani *sustema* adalah satu kesatuan yang terdiri komponn atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga merupakan kesatuan bagian- bagian yang saling berhubungan yang berada dalam satu wilayah serta memiliki item- item penggerak. Menurut Jerry FitzGerald sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berkaitan, berkumpul secara bersama- sama agar dapat menjalankan suatu kejadian atau mencapai tujuan tertentu.<sup>8</sup> Jadi sistem adalah suatu aktifitas pelaksanaan dan penerapan suatu pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya.

Pembiayaan pendidikan pada suatu lembaga biasa dikenal dengan keuangan. Berkaitan dengan pembiayaan, maka sistem keuangan pada penelitian ini adalah srangkaian aktifitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga pendidikan/ yayasan dalam rangka mengoptimalkan keuangan pada lembaga pendidikan.

## 3. Mekanisme Sistem Keuangan

Secara teoritik mekanisme sistem keuangan pendidikan disusun dengan tujuan agar operasioanlisasi pendidikan lebih terukur dan mencapai aspek- aspek yang

<sup>7</sup> E. Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005),194

<sup>8</sup> <http://jaqatsistem.informasi.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-dan-definisi-sistem.html> diunduh pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 jam 21.28 WIB

semestinya dibutuhkan. Adapun mekanisme keuangan secara teoritis meliputi perencanaan finansial, pelaksanaan, dan evaluasi. Sebagaimana menurut Jones yang dikutip oleh E Mulyasa mengemukakan “ *Financial planning is called budgeting* “merupakan kegiatan koordinasi sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. *Implementation involves accounting* ( pelaksanaan anggaran) ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan. *Evaluation involves* merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran.<sup>9</sup>

Kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu: penyusunan anggaran ( *budgeting*), pembukuan (*accounting*), pemeriksaan (*auditing*).<sup>10</sup>

#### a. *Budgeting* ( Penyusunan Anggaran)

Istilah anggaran sering kali dipahami sebagai pengertian suatu rencana. Namun dalam bidang manajemen keuangan di lembaga pendidikan sering disebut dengan RAPBS ( Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah). Istilah anggaran suatu rencana biaya untuk suatu kegiatan.

Anggaran adalah suatu rencana yang berisi jumlah uang yang dimiliki atau dapat diadakan ( pendapatan atau pemasukan) untuk membiayai kegiatan proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan tentu memerlukan anggaran untuk menunjang proses belajar mengajar. Oleh karena itu anggaran ini sifatnya masih rencana dan menyangkut keperluan proses kegiatan pendidikan, maka anggaran baru sah apabila mendapat pengesahan dari komite sekolah.

---

<sup>9</sup>E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* , ( Bandung: Remaja Rosda Karya,2007)49

<sup>10</sup>Hadari Nawawi, *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), 109

*Budgeting* memiliki empat unsur utama. Pertama, rencana yang terukur dari sebuah aktifitas atau kegiatan yang akan dilakukan. Dengan adanya budget ini akan memudahkan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Budget akan merinci tiap kegiatan secara spesifik dan sistematis yang dinyatakan dalam unit moneter. Kedua, unsur budget meliputi seluruh kegiatan sekolah yaitu mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian- bagian yang ada dalam lembaga pendidikan. Ketiga, anggaran dinyatakan dalam unit moneter yaitu unit kesatuan yang ada diterapkan pada berbagai kegiatan sekolah. Keempat, Anggaran dinyatakan dalam unit moneter yaitu unit kesatuan yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan sekolah. Dengan demikian budget berdasarkan pereode waktunya terbagi ke dalam dua jenis yaitu budget strategis (*strategic budget*) yang berlaku untuk jangka panjang dan budget taktis yang berlaku untuk jangka pendek.<sup>11</sup>

Adapun alasan lembaga pendidikan harus menyusun rencana anggaran adalah : Waktu yang akan datang penuh dengan ketidakpastian, sehingga harus dipersiapkan; Waktu yang akan datang penuh dengan berbagai alternatif pilihan, sehingga harus dipersiapkan; Sebagai pedoman kerja waktu yang akan datang; Sebagai alat pengkoordinasian kegiatan; Sebagai alat pengawasan terhadap pelaksanaan (realisasi) dari rencana yang akan datang.

Dalam rangka menyusun keuangan yang tepat bagi lembaga pendidikan, setidaknya administrator dan manajer pendidikan perlu menguasai sedikitnya 6 (enam) sistem penganggaran keuangan. Pentingnya penguasaan enam sistem ini tentunya agar operasionalisasi di lembaga pendidikan berjalan maksimal, dan dalam rangka meminimalisir tingkat ketidaksesuaian penggunaan dana baik yang sudah

---

<sup>11</sup>Sri Minarti, *Manajemen Sekolah Pengelolaan* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), 107

maupun yang belum teranggarkan. Keenam sistem ini diuraikan oleh Martin Sebagai berikut: <sup>12</sup>

1. *Line Item Budgeting (LIB)*

*Line Item Budgeting (LIB)* adalah sistem penganggaran keuangan pendidikan yang berorientasi kepada jenis barang yang diperlukan. Pengalokasiannya didasarkan kepada barang-barang yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain, sistem ini dapat dikatakan sebagai sistem penganggaran untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat rutin

2. *Capital Budgeting (CAB)*

*Capital Budgeting (CAB)* adalah sistem penganggaran pendidikan yang berorientasi pada jangka waktu yang lama. Dan pengalokasian anggaran pendidikan dilakukan dengan memperhitungkan jumlah anggaran yang diperlukan untuk perencanaan jangka panjang. Maka CAB tidak lain adalah sistem pengalokasian anggaran untuk biaya modal atau biaya pembangunan.

3. *Performance Budgeting (PEB)*

*Performance Budgeting (PEB)* ialah sistem penganggaran pendidikan yang berorientasi selain pada jenis barang yang diperlukan dan pada jangka waktu yang lebih lama, juga berorientasi kepada keluaran. Oleh sebab itu pada sistem penganggaran ini, perumusan tujuan umum maupun khusus dan kriteria pengukuran keluaran harus jelas dan dapat diukur. Adapun tujuan umum dalam hal ini sering disebut sebagai rencana sedang tujuan khusus adalah programnya.

4. *Program Budgeting (PROB)*

*Program Budgeting (PROB)* yaitu sistem penganggaran pendidikan yang dilaksanakan untuk menghindari terjadi duplikasi pelayanan

---

<sup>12</sup>Martin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 55- 60

pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh unit yang berbeda. Dalam sistem penganggaran ini, dibutuhkan koordinasi yang mantap untuk mengurangi pemborosan dana.

#### 5. *Planing Programing and Budgeting System (PPBS)*

*Planing Programing and Budgeting System (PPBS)* adalah sistem penganggaran pendidikan yang berorientasi kepada mutu keluaran, dimana anggaran pendidikan dialokasikan berdasarkan rencana dan program pendidikan yang diusulkan. Sistem penganggaran ini hampir sama dengan PEB, tetapi tujuan khusus pada FEB dirinci lagi menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih operasional yang membentuk satu atau beberapa rumpun kegiatan yang disebut proyek. Berdasarkan proyek-proyek inilah biaya dialokasikan. Pada sistem ini digambarkan secara jelas tentang kaitan antara rencana (tujuan umum), program (tujuan khusus), dan kegiatan operasional yang akan dilakukan. Alokasi anggaran disusun berdasarkan kepada kegiatan yang akan dilakukan.

#### 6. *Zero Base Budgeting (ZBB)*

*Zero Base Budgeting (ZBB)* ialah sistem penganggaran pendidikan yang berorientasi kepada keterbatasan sumber dana. Karena dana terbatas maka dalam melakukan pengalokasian anggaran harus ada penajaman prioritas baik mengenai program kegiatan maupun sasaran yang ingin dicapai.

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran adalah harus menerapkan prinsip anggaran berimbang, artinya rencana pendapatan dan pengeluaran harus berimbang, jangan sampai terjadi anggaran pendapatan kurang atau minus.

Dengan anggaran berimbang tersebut maka kehidupan sekolah akan menjadi efektif dan efisien dalam hal keuangan, maka sentralisasi pengelolaan

keuangan perlu difokuskan pada bendaharawan sekolah, dalam rangka untuk mempermudah pertanggung jawaban keuangan.<sup>13</sup>

#### b. Accounting (Pembukuan)

Kegiatan kedua dari manajemen keuangan adalah pembukuan, atau kegiatan pengurusan keuangan. Pengertian dari accounting atau pembukuan adalah kegiatan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan di sekolah yang dilakukan oleh bendahara sekolah. Pengurusan keuangan meliputi 2 hal yaitu:

1. Pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima dan mengeluarkan uang, pengurusan ini disebut dengan kepengurusan ketatausahaan.
2. Pengurusan tindak lanjut dari kepengurusan yang pertama yakni, menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan dan dikenal dengan istilah kebendaharawanan. Bendaharawan adalah orang atau badan yang oleh negara diberikan tugas untuk menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang dan surat berharga sehingga dengan jabatan itu mereka mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan terhadap urusannya kepada Badan Pemerikasa Keuangan (BPK).<sup>14</sup>

Peran dan fungsi pembukuan dalam pendidikan adalah menyediakan informasi keuangan agar berguna dalam menentukan kebijakan anggaran yang dilakukan oleh sekolah.<sup>15</sup> Secara garis besarnya pelaksanaan keuangan dikelompokkan dalam dua

---

<sup>13</sup>Martin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 111

<sup>14</sup>Arikunto, *Manajemn Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Media,2008)318

<sup>15</sup>Indra Bastian, *Akuntansi Pendidikan* (Yogyakarta: Erlangga, 2006),53

kegiatan, yaitu penerimaan dan pengeluaran keuangan.<sup>16</sup>

Bagian yang sangat penting dalam tata kelola keuangan dalam suatu organisasi termasuk sekolah adalah pembukuan. Pembukuan merupakan sumber informasi dari pertanggungjawaban keuangan yang akan disajikan dalam bentuk laporan. Dalam tahap pembukuan ini semua penerimaan dan pengeluaran uang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dibukukan sesuai dengan norma/ aturan yang baku.

Secara umum pembukuan didefinisikan sebagai pencatatan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan sekolah baik secara manual ataupun menggunakan komputer ke dalam buku- buku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang- undang Nomor 28 tahun 2007 mendefinisikan pembukuan sebagai proses pencatatan data dan informasi keuangan. Karena pengertian ini masih merupakan pengertian umum, maka perlu dicari pengertian yang lebih spesifik. Untuk tingkat sekolah, Buku Panduan BOS 2014 memberikan definisi pembukuan sebagai pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana oleh sekolah, di dalam buku kas umum dan kas pembantu. Dari definisi tersebut ada beberapa hal penting yang harus dipahami untuk dapat menyelenggarakan pembukuan dengan baik, yaitu: Jenis transaksi, jenis buku dan proses atau alur pembukuan.

Pembukuan suatu transaksi tergantung pada jenis transaksi. Pembukuan juga berarti membukukan pada buku- buku yang tepat karena ada keterkaitan dengan buku yang lainnya. Pembukuan yang dilakukan secara baik dan benar akan memberikan manfaat bagi sekolah, karena melalui pembukuan memiliki data dan rincian yang berkaitan dengan:

---

<sup>16</sup>E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*,( Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 200-201

1. Setiap penerimaan dan pengeluaran sekolah/madrasah sesuai dengan waktu terjadinya. Informasi mengenai jenis, jumlah dan waktu penerimaan atau pengeluaran dengan mudah dapat diketahui.
2. Dana yang masih tersedia dan telah terpakai pada periode tertentu.
3. Dasar penyusunan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sekolah/madrasah.

Pembukuan setiap transaksi yang berpengaruh terhadap penerimaan dan pengeluaran yang wajib dicatat oleh bendaharawan dalam buku kas yang berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP). Pencatatan di BKU dan BKP dilakukan sepanjang waktu setiap ada transaksi penerimaan dan pengeluaran uang. Dengan pembukuan yang tertib, akan mudah diketahui perbandingan antara keberadaan sumber daya fisik dan sumber daya manusia. Setiap saat pembukuan harus dapat menggambarkan mutasi yang paling akhir. Dari pembukuan yang baik, tertib dan teratur serta lengkap akan dapat disajikan pelaporan yang baik, lengkap dan bermanfaat. Pembuatan laporan dilakukan secara teratur dan periodik dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### c. *Auditing*

Langkah terakhir adalah *auditing*, bagaimana anggaran dapat melayani dengan baik untuk meningkatkan efektifitas sekolah. Pengertian *auditing* adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Arikunto, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2008), 317

*Auditing* adalah fungsi manajemen pendidikan yang harus dilakukan oleh setiap kepala sekolah/ madrasah untuk mengukur kinerja bendaharawan sekolah. Untuk itu auditing diartikan sebagai proses mengukur dan menilai tingkat efektifitas kerja personil serta tingkat efisiensi penggunaan dana sekolah dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan lembaga pendidikan. Auditing bermanfaat untuk menemukan masalah keuangan sekolah serta hasil auditing dapat digunakan untuk meningkatkan perasaan tanggung jawab bagi bendahara sekolah.<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban yang telah dicapai harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban merupakan pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud dengan dilaksanakan, sedang apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas. Proses ini menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan dana kepada pihak yang berhak.

Pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan dapat diidentifikasikan ke dalam tiga hal yaitu pengendalian penggunaan, alokasi dana, bentuk pertanggungjawaban dana pendidikan dan keterlibatan pengawasan eksternal sekolah. Dalam evaluasi pembiayaan pendidikan, pengawasan merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam manajemen pembiayaan pendidikan berbasis sekolah. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kewenangan, karena kebutuhan mereka merupakan bagian dari pengawasan yang melekat. Dalam manajemen pembiayaan berbasis sekolah, kepala sekolah perlu mengadakan pengendalian pengeluaran keuangan selaras dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan. Artinya kepala sekolah

---

<sup>18</sup>Abin Syamsudin Makmun, *Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah*( Bandung: Pustaka Educa,2010), 169

sebagai pimpinan bertanggung jawab terhadap masalah internal manajemen pembiayaan sebagai atasan langsung.

Pengawasan pembiayaan pendidikan harus dilakukan melalui aliran masuk dan keluar uang yang dibutuhkan oleh bendahara. Hal itu dilakukan mulai pos anggaran pembelanjaan, perhitungan dan penyimpanan barang oleh petugas yang ditunjuk. Secara administrasi pembukuan setiap pengeluaran dan pemasukan setiap bulan ditandatangani sebagai berita acara. Kepala sekolah sebagai atasan langsung bertanggung jawab penuh atas pengendalian. Sedangkan pengawasan dari pihak yang berwenang melalui pemeriksaan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal, seperti petugas dari kementerian pendidikan dan kebudayaan dan inspektorat.

Prosedur pengendalian penggunaan alokasi anggaran sifatnya sangat normatif administratif. Artinya pemenuhan pengendalian masih terbatas pada angka kuantitatif yang terdokumentasi. Dengan demikian aspek-aspek realistik penggunaan sulit diukur secara obyektif. Persoalan tersebut sering terjadi di sekolah/ madrasah. Hal ini karena belum berjalannya fungsi administrasi keuangan dimana aliran uang dan barang dapat teridentifikasi sesuai dengan peran dan fungsinya.

## B. Sekolah Islam Terpadu

### 1. Konsep Sekolah Islam Terpadu

Sekolah Islam Terpadu menawarkan satu model sekolah alternatif. SIT adalah sekolah yang mencoba menerapkan pendekatan penyelenggaraan yang memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi satu jalinan kurikulum. Dengan pendekatan ini, semua mata pelajaran dan semua kegiatan sekolah tidak lepas dari bingkai ajaran dan pesan nilai Islam. Sekolah Islam terpadu juga berupaya mengoptimalkan peran orang tua dan masyarakat dalam proses pengelolaan sekolah dan pembelajaran. Orang tua dilibatkan secara aktif untuk memperkaya dan memberi perhatian yang memadai dalam

proses pendidikan putra- putri mereka. Sementara itu kunjungan ataupun interaksi keluar sekolah merupakan upaya untuk mendekatkan peserta didik terhadap dunia nyata yang ada di tengah masyarakat. Sekolah Islam terpadu diselenggarakan berdasar konsep “*one for all*” artinya dalam satu atap sekolah peserta didik akan mendapatkan pendidikan umum, pendidikan agama dan pendidikan ketrampilan. Pendidikan umum akan mengacu pada kurikulum nasional yang dikembangkan oleh kementerian Pendidikan Nasional. Pendidikan agama menekankan pendidikan aqidah, akhlak dan ibadah yang dikaitkan dalam kehidupan sehari- hari. Menumbuhkan *biah sholihah* di dalam lingkungan sekolah dan *qudwah hasanah* oleh seluruh guru dan karyawan sekolah. Adapun pendidikan ketrampilan dikemas dengan kegiatan ekstra kurikuler yang menyediakan beragam pilihan kegiatan yang seluruhnya mengacu pada prinsip- prinsip ketrampilan hidup (*life skill*).<sup>19</sup>

Sekolah Islam terpadu dengan sistem pendidikan Islam terpadu diharapkan dapat mengintegrasikan antara nilai- nilai agama dan nilai- nilai ilmu pengetahuan yang pada gilirannya mampu melahirkan manusia yang memiliki kematangan profesional dan spiritual. Dalam prosesnya pendidikan harus berusaha membangun manusia berkualitas yang ditandai dengan peningkatan kecerdasan, pengetahuan, ketrampilan dan ketaqwaan sehingga terbentuk ulama dalam pengertian yang sesungguhnya.

Untuk menciptakan sistem pendidikan terpadu yang mampu mengakomodir seluruh potensi peserta didik dengan utuh, sehingga menghasilkan manusia paripurna (*insan kamil*), maka perlu adanya keterpaduan yang harmonis dalam semua komponen pendidikannya yang dilakukan secara integral dan terpadu. Adapun elemen- elemen yang harus dipadukan dalam sistem pendidikan ini adalah: 1) keterpaduan tujuan dan jenjang pendidikan, 2) keterpaduan keilmuan, 3) keterpaduan kurikulum

<sup>19</sup>Standar Mutu Sekolah Islam Terpadu, (Jakarta: JSIT Indonesia, 2010),

pendidikan, 4) keterpaduan tenaga kependidikan dan sarana, 5) keterpaduan manajemen pendidikan.<sup>20</sup>

## 2. Format Pendidikan Islam Terpadu

Pendidikan merupakan suatu proses membina seluruh potensi manusia sebagai makhluk yang beriman, berfikir dan berkarya untuk kemaslahatan diri dan lingkungannya. Membangun sekolah yang berkualitas berarti menyelenggarakan proses pendidikan yang membentuk kepribadian peserta didik agar sesuai dengan fitrahnya.<sup>21</sup> Sebagai manusia seutuhnya yang berkualitas, baik materiil maupun spirituil maka diperlukan sistem pendidikan yang integral dan berorientasi pada pengembangan seluruh potensi dan dimensi peserta didik secara proporsional.<sup>22</sup>

Sekolah yang dikelola dengan manajemen modern, kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan masa depan pendekatan pembelajaran yang mampu mengoptimalkan perkembangan kemampuan peserta didik dan fasilitas yang sangat memadai sebagai sekolah modern yang efektif. Kriteria sekolah modern yang efektif menurut hasil analisis yang dilakukan oleh *the connecticut school effectiveness project* sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Lingkungan yang asri, nyaman dan aman yang memunculkan suasana kondusif bagi kegiatan belajar mengajar.
- b. Misi sekolah yang jelas dengan komitmen kepada tujuan instruksional, prioritas, prosedur *assessment* dan akuntabilitas.
- c. Kepemimpinan instruksional di bawah arahan kepala sekolah yang memahami dan menerapkan berdasarkan karakteristik efektivitas instruksional.
- d. Adanya iklim dimana seluruh staff guru mengharapkan dengan sangat (*high expectation*)

<sup>20</sup> Agus Retnanto, *Sistem Pendidikan Islam Terpadu*, (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2014), 73

<sup>21</sup> Standar Mutu sekolah Islam Terpadu, 20

<sup>22</sup> Agus Retnanto, *Sistem Pendidikan Islam Terpadu*, (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2014), 72

<sup>23</sup> Standar Mutu sekolah Islam Terpadu, 24

- akan tuntasnya pencapaian *basic skill* oleh peserta didik.
- e. Motivasi mengajar yang tinggi yang dibarengi dengan harapan yang tinggi dari seluruh staf pengajar akan terbentuknya *basic skill* di kalangan seluruh peserta didik.
  - f. Tenaga kependidikan yang *high time on task* selalu berorientasi pada penyelesaian tugas, terampil dalam mengelola waktu secara efektif.
  - g. Supervisi yang efektif kepada seluruh pengajar, upaya memberikan bimbingan, *feedback* dan dukungan kepada staf pengajar.
  - h. Pemantauan yang berkelanjutan terhadap kemajuan prestasi peserta didik, menggunakan hasil belajar peserta didik untuk program pengembangan individual maupun perbaikan program instruksional, serta melakukan penilaian yang sistematis.
  - i. Hubungan sekolah dan rumah yang positif dimana orangtua memberikan dukungan yang bermakna dan memainkan peranan penting dalam pencapaian misi utama sekolah.

Dengan menegakkan sejumlah kriteria di atas, upaya mencapai efektifnya suatu sekolah akan terwujud dan harus didukung dengan manajemen yang benar dan memiliki komitmen yang tinggi yang mampu merencanakan tujuan, program dan langkah- langkahnya secara strategis.

### 3. Bentuk Keterpaduan Pendidikan Islam Terpadu

Salah satu kebijakan Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam pada sekolah umum yaitu Pola Pembinaan Pembinaan Agama Islam Terpadu, yang isinya terdiri atas tiga komponen pokok. Yaitu keterpaduan proses pendidikan, keterpaduan penyelenggaraan pendidikan, dan keterpaduan materi kurikulum.<sup>24</sup>

Keterpaduan proses pendidikan adalah bagaimana sebuah lembaga mengimplementasikan enam elemen

---

<sup>24</sup> Agus Retnanto, *Sistem Pendidikan Islam Terpadu*, ( Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2014), 77

penting, yaitu: kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai religious, menerapkan kedisiplinan sekolah dalam arti luas yang memodelkan, mempromosikan dan memegang nilai-nilai Islam di lingkungan sekolah, Menciptakan perasaan bersama sebagai komunitas sekolah, organisasi siswa yang diselenggarakan oleh mereka sendiri, menciptakan atmosfer moral yang timbal balik dengan menjunjung tinggi respek dan mampu memperkenalkan arti penting nilai religious keagamaan/moralitas dengan memberikan perhatian dan waktu yang khusus terhadap masalah moral.

Keterpaduan penyelenggaraan pendidikan secara langsung bersentuhan dengan masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan yang berlandaskan Islam yang memadukan aspek pembentukan kepribadian Islam, dasar-dasar penguasaan pengetahuan Islam dan sains teknologi dalam suasana budaya pendidikan yang humanis religious serta didukung pran orang tua dan masyarakat.

Keterpaduan materi kurikulum adalah keterpaduan antara pendidikan agama Islam dengan materi pendidikan umum lainnya seperti matematika, biologi, fisika, kimia. Keterpaduan ini merupakan bagian penting dari proses pendidikan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem hidup Islam.

#### 4. Standar Mutu Sekolah Islam Terpadu

Berdasarkan buku petunjuk Standar Mutu Sekolah Islam Terpadu Indonesia, ada 12 standar mutu sekolah Islam terpadu. Standar mutu yang diterapkan pada sekolah Islam terpadu, yang tergabung dalam jaringan sekolah Islam terpadu Indonesia terdiri dari 12 standar mutu. Adapun 12 standar mutu itu yang 8 mengacu pada standar mutu dari kementerian pendidikan dan kebudayaan Indonesia serta 4 standar mutu pendidikan yang menopang keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan dan target pendidikan yang mencapai target pendidikan terpadu yaitu siswa memiliki akhlak mulia dan bermanfaat di masyarakat.

Adapun 12 standar mutu sekolah Islam terpadu di Indonesia adalah sbb :a. Standar Konsep, b. Standar

pendidik dan tenaga kependidikan, c. Standar sarana prasarana dan pengelolaan pusat sumber belajar, d. Standar pengelolaan, e. Standar Kerjasama, f. Standar Pembiayaan g. Standar Kurikulum Sekolah Islam Terpadu, h. Standar pendidikan Agama Islam, i. Standar Kompetensi Lulusan, j. Standar Proses, k. Standar Pembinaan siswa, l. Standar Penilaian.<sup>25</sup>

### C. Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Yayasan Pengembangan Ummat Sidik Pati

#### 1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu dari kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* (melakukan) . Kata- kata itu digabung menjadi *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke bahasa Inggris to *manage* (kata kerja), *management* ( kata benda), dan *manager* untuk orang yang melakukannya. *Management* diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Pengelolaan.<sup>26</sup> Manajemen pada dasarnya merupakan suatu proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Maka dalam ilmu ekonomi yang memfokuskan pada *profit* (keuntungan) yang komersial.<sup>27</sup>

Menurut Griffin sebagaimana dikutip Donni Juni Priansa dan Sonny Suntani Setiana menyatakan bahwa manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal.<sup>28</sup>

<sup>25</sup>Standar Mutu sekolah Islam Terpadu, xiii- xx

<sup>26</sup>Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 5-6

<sup>27</sup>Muhaimin, etc all., *Manajemen Pendidikan Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/ Madrasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 4

<sup>28</sup>Donni Junni Priansa & Sonny Suntani Setiana, *Manajemen & Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 4

Berdasar pendapat Arifin Abdurrachman sebagaimana dikutip oleh M. Ngalim Purwanto, manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia / orang- orang dan sumber daya lainnya.<sup>29</sup>

Menurut Andrew J. Dubrin dalam Bedjo Sujanto menyatakan “ *the term manajement is refer to the process of using organizational resources to achieve organizational objectives through the functions of Planing and decision making, organization, leading and controlling.*”<sup>30</sup> Dijelaskan oleh Dubrin bahwa pada dasarnya manajemen adalah suatu proses pemanfaatan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian dari semua kegiatan dan sumber-sumber yang dimiliki, kepemimpinan serta pengawasan terhadap semua aktivitas organisasi.

Menurut Srgiovanni, Barlingome, Coonbs dan Thurton mendefinisikan manajemen sebagai *process of working with an d through order to accomplish organizational goals efficiently*. Yaitu proses kerja dengan dan melalui memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan kerjasama (administrasi) secara efisien pengertian tersebut sesuai dengan pendapat Gorton yang menegaskan bahwa manajemen merupakan metode yang digunakan administrator untuk melakukan tugas- tugas tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>31</sup>

Jadi manajemen pembiayaan menurut penulis adalah suatu aktivitas yang memberdayakan orang lain dalam

---

<sup>29</sup> M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 7

<sup>30</sup> Bedjo Sujanto, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Sagung Seto, 2012), 40

<sup>31</sup> Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2006), 39

suatu organisasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan secara efektif dan efisien untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

## 2. Analisis Lingkungan

Menurut Coombs H.Phillip dan Hallak Jacques dalam Akdon merumuskan 5 elemen penting dalam sebuah system pendidikan yaitu: a) tujuan (*objectives*), b) keluaran (*outputs*), c) manfaat (*benefits*), 4) proses internal/ PBM (*internal process*), serta 5) masukan (*inputs*).<sup>32</sup> Agar kelimanya bisa tercapai secara maksimal maka perlu analisis lingkungan dan mngembangkan strategi untuk mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada.

Proses analisis, perumusan dan evaluasi strategi-strategi itu disebut perencanaan strategis. Tujuan utama perencanaan strategis adalah agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi- kondisi internal dan eksternal sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal.<sup>33</sup> Dengan perencana ini lembaga pendidikan mampu bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan dukungan yang optimal dari sumber daya yang ada.

Menurut Chandler strategi merupakan alat untuk mncapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Sedangkan strategi menurut Porter dalam Freddy adalah alat yang sangat penting untuk mencapai tujuan.<sup>34</sup>

Strategi dalam manajemen pembiayaan pendidikan berorientasikan pada fungsi- fungsi kegiatan manajemen. Mulai perencanaan hingga pengawasan yang terarah pada tujuan strategi lembaga pendidikan. Strategik merupakan suatu cara yang menekankan hal- hal yang

<sup>32</sup>Akdon etc all, *Manajemen Pmbiayaan Pendidikan*, 1

<sup>33</sup> Freddy Rangkuti, *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*,(Jakarta: Kompas Gramedia, 2015),3

<sup>34</sup>Freddy Rangkuti, *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*,

berkaitan dengan kegiatan manufaktur dan pemasaran Semuanya bertujuan untuk mengembangkan produktivitas perusahaan.

Sejalan dengan pengertian di atas, dari sudut etimologis (asal kata), berarti penggunaan kata strategi dalam manajemen sebuah organisasi, dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi- fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan strategik organisasi. Rancangan yang bersifat sistematis itu, dilingkungan sebuah organisasi disebut perencanaan strategik.<sup>35</sup> Sehingga dalam organisasi atau lembaga pendidikan manajemen strategik semakin berkembang.

Manajemen strategic menurut Wahyudi dalam Akdon adalah suatu seni dalam ilmu dari pembuatan (formulating), penerapan (implemmnting), dan evaluasi (evaluating) tentang keputusan- keputusan strategis antar fungsi- fungsi yang mmungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan- tujuan masa mendatang.<sup>36</sup>

Salah satu proses dalam manajemen strategic adalah penilaian lingkungan melaui proses analisis lingkungan organisasi. Yang dimaksud lingkungan organisasi meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pngaruh- pengaruh di dalam dan sekeliling organisasi yang berdampak pada kehidupan organisasi berupa kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal dan tantangan eksternal.<sup>37</sup>

Lingkungan internal meliputi: kekuatan (*strength*) adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memenuhi keuntungan strategic dalam mencapai visi dan misi. Kelemahan internal (*weakness*) adalah situasi dan faktor- faktor luar organisasi yang bersifat negative, yang menghambat organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi.

<sup>35</sup> Akdon, *Strategi Manajement for ducational Management*, 5

<sup>36</sup> Akdon, *Strategi Manajement for ducational Management*.

<sup>37</sup> Akdon, *Strategi Manajement for ducational Management*, 111

Lingkungan eksternal meliputi: peluang (*opportunity*) adalah situasi dan faktor- faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang membantu organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi. Tantangan/ ancaman (*Threat*) adalah faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negative, yang dapat mengakibatkan organisasi gagal dalam mencapai visi dan misi.

#### a. Analisis Lingkungan Internal

Penilaian Lingkungan Internal ini mencermati (*scanning*) kekuatan dan kelemahan di lingkungan internal organisasi sendiri yang dapat di kelola manajemen meliputi antara lain:

- 1) Struktur organisasi termasuk susunan dan penempatan personilnya.
- 2) Sistem organisasi dalam mencapai efektivitas organisasi termasuk efektivitas komunikasi interaksi.
- 3) Sumber daya manusia, sumber daya alam, tenaga terampil (*skill*) dalam tingkat pemberdayaan sumber daya, termasuk komposisi dan kualitas sumber daya manusianya.
- 4) Biaya operasional berikut sumber dananya.
- 5) Faktor- faktor lain yang menggambarkan dukungan terhadap proses kinerja/misi organisasi yang sudah ada, maupun yang secara potensial dapat muncul di lingkungan internal organisasi seperti teknologi yang telah digunakan saat ini.

#### b. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal mencermati peluang dan tantangan yang ada di lingkungan eksternal organisasi sendiri (yang tidak dikelola manajemen) yang meliputi berbagai faktor yang dapat dikelompokkan dalam bidang/ aspek.

- 1) *Task environment*, secara langsung berinteraksi dan mempengaruhi organisasi seperti: klien, konsumen, *stakeholder*, pesan pelanggan.
- 2) *Societal environment*, pada umumnya terdiri dari beberapa elemen penting seperti ekonomi,

teknologi, social budaya, politik, hokum, lingkungan hidup, ekologi, geografi.

- 3) *Economic environment*, merupakan suatu kerawanan bagi kebanyakan organisasi, dan analisisnya paling sulit dilakukan, karena menyangkut ekonomi tingkat nasional. Misalnya masalah keuangan negara, tingkat inflasi, suku bunga, dan sebagainya.
- 4) *Technological environment*, merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan *economic environment*. Kemajuan teknologi yang sangat pesat pada saat ini menuntut organisasi untuk selalu mengikuti perubahan teknologi ini agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
- 5) *Social environment*, menjadi yang paling penting dalam kehidupan organisasi karena menyangkut perilaku social dan nilai- nilai budaya (*social attitude and values*). Transparansi/ keterbukaan merupakan suatu tuntunan baru, terutama terhadap pemerintahan, sementara kritik masyarakat harus diperhatikan, dan adanya tuntutan akan peningkatan quality of life yang semakin gencar.
- 6) *Ecological environment*, merupakan hal yang sangat sulit dianalisis. Identifikasi tentang kecenderungan dan peluang akan sulit dilakukan, karena sangat tergantung pada kematangan (*maturity*) lingkungan, belum ada suatu pembakuan yang telah disepakati bersama.
- 7) *Political environment*, merupakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan bidang kegiatan organisasi, misalnya kebijakan perpajakan moneter, perizinan, yang mempunyai dampak jangka panjang pada efektifitas organisasi.
- 8) *Security environment*, terutama bagi Indonesia masa kini merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan dengan teliti. Masalah keamanan akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan

kelangsungan suatu organisasi terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.<sup>38</sup>

Dengan demikian manajemen pembiayaan dengan perencanaan strategis (*strategic planner*) dengan menganalisis faktor- faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT. Analisis SWOT membandingkan antar faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strengths*), dan kelemahan (*weaknesses*).<sup>39</sup>

### 3. Fungsi Manajemen

#### a. Perencanaan (*Planning*)

##### 1). Definisi Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan untuk menentukan apa yang harus dikerjakan, kapan dikerjakan dan siapa yang mengerjakan. Dalam perencanaan itu tersirat pembuat keputusan. Perencanaan yang baik memuat kerangka yang berisi sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, yang digunakan untuk menyusun rangkaian kegiatan selanjutnya pada masa depan. Proses seorang manajer mengantisipasi masa yang akan datang dan merumuskan alternatif terbaik dengan serangkaian tindakan. Perencanaan adalah salah satu fungsi manajer yang meliputi seleksi dan alternatif-alternatif kebijaksanaan, program dan prosedur.<sup>40</sup>

Menurut Fakry dalam Udin Syefudin perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk

<sup>38</sup>Akdon, *Strategi Manajemen for ducational Management*,113-115

<sup>39</sup>Freddy Rangkuti, *Teknik Membdah Kasus Bisnis Analisis SWOT*,

20

<sup>40</sup>Fatah Syukur, *Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015),19

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan ini dapat pula diberi arti sebagai suatu proses pembuatan serangkaian kebijakan untuk mengendalikan masa depan sesuai yang ditentukan. Perencanaan dapat pula diartikan sebagai upaya untuk memadukan antara cita- cita nasional dan resources yang tersedia yang diperlukan untuk mewujudkan cita- cita tersebut.

<sup>41</sup>

Perencanaan menurut peneliti adalah proses penyusunan berbagai keputusan untuk memberikan arah untuk tercapainya sasaran dan tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pembiayaan dalm dunia pendidikan sering disebut keuangan. Perencanaan dalam manajemen keuangan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan untuk tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Perencanan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai tujuan berhubungan dengan anggaran penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap kegiatan.<sup>42</sup>

Perencanaan sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai suatu kegiatan pendidikan di suatu lembaga pendidikan disebut penganggaran atau *budgeting*. Yang biasa disebut Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah (RAPBS). Anggaran adalah suatu rencana yang berisi jumlah uang yang dimiliki atau dapat diadakan (pendapatan atau pemasukan) untuk membiayai kegiatan proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan tentu

---

<sup>41</sup> Udin Syaefudin Saud dan Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014),4-5

<sup>42</sup>Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*,159

memerlukan anggaran untuk menunjang proses belajar mengajar. Oleh karena itu, anggaran ini sifatnya masih rencana dan menyangkut keperluan proses kegiatan pendidikan, maka anggaran baru sah bila mendapat pengesahan dari komite sekolah.<sup>43</sup>

Perencanaan pembiayaan menurut peneliti adalah kegiatan merencanakan sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

## 2). Model Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Menurut Husaini Usman dalam buku Manajemen ada beberapa model perencanaan pendidikan diantaranya:<sup>44</sup>

### a). Model Komprehensif

Model ini digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan secara menyeluruh. Selain itu berfungsi juga sebagai pedoman dalam menguraikan rencana-rencana yang lebih khusus ke arah tujuan yang luas.

### b). Model Pembiayaan dan Keefektifan Biaya

Model ini digunakan untuk menganalisis proyek dengan kriteria efisiensi dan efektifitas. Dengan model ini dapat diketahui proyek mana yang paling layak atau terbaik dibandingkan dengan proyek lainnya.

### c). Model PPBS

*Planning Programing Bugjeting System* (PPBS) atau sistem perencanaan, pemrograman, dan penganggaran banyak digunakan diperguruan tinggi negeri. PPBS merupakan suatu pendekatan sistematis dan

<sup>43</sup>Hadari Nawawi, *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit*, 110

<sup>44</sup>Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 97

komprehensif yang berusaha menentukan tujuan, mengembangkan program- program untuk dicapai dengan menggunakan anggaran seefisien dan seefektif mungkin, dan mampu menggambarkan kegiatan program jangka panjang.

d). Model Target *Setting*

Model ini digunakan untuk memperkirakan atau memproyeksi tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Dalam persiapannya diperlukan model untuk analisis demografis dan proyeksi penduduk, model untuk memproyeksikan jumlah peserta didik (environment) di sekolah, dan model untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja.

3). Metode Perencanaan

Menurut Smith dalam Husaini Utsman, metode perencanaan pendidikan adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

a). Analisis Sumber- cara- Tujuan ( *Mean- Ways- Goal Analysis*)

Metode ini dipakai untuk meneliti sumber- sumber dan alternatif mencapai tujuan tertentu. Tiga faktor yang perlu dianalisis antara lain: a. sumber, b. cara untuk mncapai tujuan, c. tujuan.

b). Analisis Masukan Keluaran ( *Input- Output Analysis*)

Metode ini dikaji untuk mengkaji faktor- faktor input pendidikan yang mempengaruhi proses dan akibatnya terhadap keluaran secara interelasi dan interdependensi. Metode ini untuk menilai alternarif dalam proses transformasi.

c). Analisis Ekonometrik ( *Ekonometrik Analysis*)

Metode ini memakai data empirik, statistik, dan teori ekonomi dalam mengukur perubahan dalam hubungannya dengan ekonomi. Metode ini dekat dengan pendekatan untung rugi.

---

<sup>45</sup>Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*,(Jakarta: Bumi Aksara,2016), 98-100

Metode ini menggunakan persamaan yang mendeskripsikan hubungan interdependensi variabel- variabel yang ada dalam satu sistem.

d). Diagram Sebab Akibat (*Cause- Effect Diagram*)

Metode ini dipakai dalam perencanaan yang menggunakan sekuen hipotetik untuk mendapatkan gambaran masa depan. Metode ini mirip dengan perencanaan stratejik.

e). Delphi

Metode ini dipakai untuk menentukan jumlah alternatif program, mendapatkan asumsi atau fakta yang melandasi pertimbangan tertentu dengan mencari informasi yang dibutuhkan untuk mencapai konsensus. Dimulai dngan mengemukakan suatu masalah umum kemudian dijabarkan secara khusus untuk dipecahkan masing- masing ahlinya.

f). Heuristik

Metode ini dipakai untuk mendapatkan isu- isu dan mengakomodasi pendapat yang bertentangan. Metode ini didasarkan atas prinsip dan prosedur yang mensistematiskan langkah- langkah pemcahan masalah.

g). Analisis Siklus Kehidupan (*Life-Cycle Analysis*)

Metode ini dipakai untuk mengalokasikan sumber daya dengan memperhatikan siklus kehidupan produksi (lulusan), proyek, program dan kgiatan pndidikan. Tahapannya meliputi: konseptualisasi, spesifikasi, pengembangan prototipe, pengujian dan evaluasi, operasi dan produksi (lulusan)

h). Analisis Nilai Tambah (*Value Added Analysis*)

Metode ini dipakai untuk mengukur keberhasilan peningkatan lulusan atau pelayanan pendidikan sehingga diperoleh gambaran kontribusi aspek tertentu terhadap aspek lainnya. Metode ini mirip dengan teori inkremental

i). Proyeksi

Perencanaan pendidikan dengan menggunakan metode proyeksi yang

menghasilkan metode pemecahan penduduk lima tahunan, data persekolahan, proyeksi penduduk dan penduduk usia sekolah, proyeksi siswa, proyeksi ruang, proyeksi ruang kelas, dan proyeksi kebutuhan guru.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah proses manajerial yang berkelanjutan. Ilmu dan teknologi terus berkembang maka lingkungan pendidikan pun akan berubah. Maka seorang manajer akan menyesuaikan strategi yang telah disusunnya sehingga tujuan bisa tercapai secara efektif dan efisien.

Fungsi ini merupakan susunan prosedur, tata kerja, tata laksana, dan hal-hal yang mengatur organisasi itu agar bisa berjalan lancar. Melalui pengorganisasian diaturlah pembangunan kerja, hubungan kerja, struktur kerja dan pendelgasian wewenang.<sup>46</sup>

Mengorganisasikan adalah proses mengatur, mengalokasikan dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya diantara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>47</sup> Mengorganisasikan menjadi sangat penting dalam manajemen karena membuat posisi orang jelas dalam struktur dan pekerjaannya dan melalui pemilihan dan pengalokasian dan pendistribusian kerja yang profesional, organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Maka perlu mendesain organisasi yaitu penentuan struktur organisasi yang paling memadai untuk strategi, orang, teknologi, dan tugas organisasi. Unit-unit kerja perlu dibentuk, demikian pula hubungan antara pengurus dan manajer serta antara manajer dan pegawai perlu ditentukan sehingga akan melahirkan struktur organisasi yang dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antar bagian komponen dan

<sup>46</sup>Fatah Syukur, *Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan*, 19

<sup>47</sup> Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 95

posisi dalam sebuah organisasi serta cara mengoordinasikan aktivitas organisasi.<sup>48</sup>

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

*Actuating* diartikan sebagai penggerak adalah kegiatan manajemen untuk membuat orang lain suka dan dapat bekerja secara ikhlas serta dengan rencana dan pengorganisasian. Dalam manajemen terdiri potensi yang dimiliki oleh staff dan anggota agar potensi- potensi tersebut dapat bermanfaat secara optimal, maka perlu digerakkan oleh manajer.<sup>49</sup> Pelaksanaan dalam fungsi manajemen adalah pelaksanaan kepemimpinan atau memimpin.

Memimpin institusi pendidikan lebih menekankan pada upaya mengarahkan dan memotivasi para personil agar dapat melaksanakan tugas pokok fungsinya dengan baik. Memimpin menurut Stoner dalam Engkoswara adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan anggota kelompok atau seluruh organisasi.<sup>50</sup> Kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisasi dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Memimpin merupakan proses mempengaruhi yang lain untuk bekerja menuju pencapaian tujuan tertentu.<sup>51</sup>

Sistem keuangan dalam fungsi ini adalah *accounting*. Proses pencacatan pemasukan keuangan dari berbagai sumber serta pengeluaran untuk berbagai kegiatan pendidikan yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja sekolah.

---

<sup>48</sup> Donni Junni Priansa & Sonny Suntani Setiana, *Manajemen & Supervisi Pendidikan*, 23- 24

<sup>49</sup> Donni Junni Priansa & Sonny Suntani Setiana, *Manajemen & Supervisi Pendidikan*, 19-20

<sup>50</sup> Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, 95

<sup>51</sup> Donni Junni Priansa & Sonny Suntani Setiana, *Manajemen & Supervisi Pendidikan*, 24

d. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang system umpan balik informasi sesungguhnya dengan standar terlebih dahulu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin secara optimal sumber daya organisasi yang digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien agar tercapainya sasaran organisasi. Jadi tujuan utama dari pengendalian adalah memastikan bahwa hasil kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.<sup>52</sup>

Lewat fungsi pengendalian ini manajer mempertahankan organisasi tetap pada jalurnya. Pengendalian sangat penting untuk meminimalisasikan tingkat kesalahan. Karena dengan adanya control, maka kesalahan akan cepat diatasi.<sup>53</sup> Dengan pengendalian ini diharapkan: 1) dapat diketahui atau dipastikan kemajuan yang diperoleh dalam pelaksanaan perencanaan; 2) dapat diramalkan arah perkembangan dan hasil yang akan dicapai; 3) dapat menentukan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menghadapi permasalahan yang muncul; 4) memberikan masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki perencanaan yang akan datang; 5) mengetahui adanya penyimpangan terhadap perencanaan sedini mungkin.<sup>54</sup> *Auditing* adalah fungsi di dalam manajemen pendidikan yang harus dilakukan oleh setiap kepala sekolah/madrasah untuk mengukur kinerja bendaharawan sekolah. Untuk itu, *auditing* diartikan sebagai proses mengukur dan menilai tingkat efektifitas kerja personil serta Pengendali keuangan suatu lembaga merupakan suatu bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap apa yang

<sup>52</sup>Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*,24

<sup>53</sup>Fatah Syukur, *Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan*, 20

<sup>54</sup>Fatah Syukur, *Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan*, 25

telah dicapai harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Auditing merupakan evaluasi dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan dapat diidentifikasi dalam tiga hal, yakni: *Pertama*, pendekatan pengendalian alokasi dana. *Kedua*, bentuk pertanggungjawaban dana, seperti dilaksanakan dalam bentuk laporan bulanan atau triwulan, tahunan atau akhir periode. *Ketiga*, keterlibatan pengawasan dari pihak eksternal lembaga pendidikan.<sup>55</sup>

#### 4. Sumber- sumber Pembiayaan

Dalam peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2005 Pasal 49 tentang standar pengelolaan satuan pendidikan disebutkan: (1) pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.<sup>56</sup>

Pasal 46 Undang-undang No 20 Tahun 2003 menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.<sup>57</sup> Berdasarkan tuntutan kebutuhan di sekolah tersebut utamanya kebutuhan pengembangan pembelajaran yang sangat membutuhkan biaya yang relatif banyak, maka sumber pendapatan diupayakan dari berbagai pihak agar membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah, disamping sekolah perlu melakukan usaha mandiri yang bisa menghasilkan dana. Hal ini akan terwujud apabila manajemen sekolah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di samping kreativitas sekolah juga menjadi andalan utama.

Landasan hukum standar pembiayaan pendidikan di Indonesia berdasar kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab XIII yang di

<sup>55</sup>E. Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*,(Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), 81

<sup>56</sup>JSIT Indonesia, *Standar Mutu Sekolah Islam Terpadu/*

<sup>57</sup>UU No 20 Tahun 2003

dalamnya juga memuat sumber pembiayaan pendidikan di mana pada pasal 46 (1) disebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.<sup>58</sup>

Hal serupa dikuatkan pula oleh Mujamil Qomar bahwa sumber pembiayaan pendidikan terdiri dari: a) Pemerintah baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah, maupun kedua-duanya, bersifat umum dan khusus serta diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan, b) Orang tua atau peserta didik, dan c) Masyarakat baik mengikat maupun tidak mengikat.<sup>59</sup>

Di lembaga pendidikan Islam secara umum, sumber pembiayaan pendidikan di antaranya juga dapat diperoleh dari: *Pertama*, wakaf. Wakaf adalah sumbangan dalam pengertian umum merupakan hadiah yang diberikan untuk memenuhi banyak kebutuhan spiritual dan temporal kaum muslimin. Dana-dana yang diperoleh dari sumbangan tersebut digunakan untuk membangun dan merawat tempat ibadah, mendirikan sekolah dan rumah sakit, menafkahi para ulama dan da'i, mempersiapkan kebutuhan kaum muslimin dan memasok senjata bagi para pejuang yang berperang di jalan Allah. *Kedua*, zakat. Pendidikan termasuk ke dalam kepentingan sosial, sudah sepantasnya zakat dapat dijadikan sumber dana pendidikan. Dana zakat harus dikelola secara profesional dan transparan agar sebagiannya dapat dipergunakan untuk membiayai lembaga pendidikan Islam. *Ketiga*, sedekah. Sedekah merupakan anjuran agama yang besar nilainya. Orang yang bersedekah pada jalan Allah akan mendapat ganjaran dari Allah tujuh ratus kali nilainya dari harta yang disedekahkan, bahkan melebihi dari itu. Dari penjelasan tersebut, maka sedekah pula dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan pendidikan seperti untuk gaji pengajar, beasiswa maupun untuk sarana dan prasarana pendidikan Islam. *Keempat*, hibah. Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang

---

<sup>58</sup>UU No 20 Tahun 2003

<sup>59</sup> Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Surabaya: Erlangga, 2007),166

untuk kepentingan seseorang atau untuk badan sosial, keagamaan, dan ilmiah. Dengan melihat pengertian hibah, jelas bahwa hibah termasuk salah satu sumber pembiayaan dalam pendidikan.<sup>60</sup>

Menurut Standar Mutu Sekolah Islam Terpadu sumber pembiayaan pendidikan adalah bentuk pemasukan finansial maupun non finansial yang dapat dikonversikan dan dihitung dalam rupiah. Adapun pembiayaan pendidikan bersumber dari : a. RAPBS-1 dan RAPBS-2 yang sudah disahkan disebut APBS-1 dan APBS-2 berisi didalamnya program kegiatan yang sudah dirumuskan untuk satu periode ke depan, didalamnya tertuang kegiatan- kegiatan serta anggarannya masing- masing sesuai dengan pos- pos pengeluaran pendidikan ditingkat sekolah, b. Dari sisi pendanaan (pendapatan) seluruh jenis dan sumber pendapatan yang diperoleh setiap periode harus dituangkan dalam APBS baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kab/ Kota, masyarakat maupun unit usaha sekolah dan sumber- sumber lain yang diperoleh secara langsung oleh sekolah. c. Dari sisi belanja sekolah APBS berisi seluruh jenis pengeluaran untuk kegiatan pendidikan di sekolah yang diketahui bersama oleh unsur pimpinan sekolah, yayasan, komite, dan *stakeholder* terkait lainnya. d. Bentuk pemasukan dari peserta didik berupa dana pengembangan, dana pendidikan, SPP, dana kegiatan, dan dana infaq atau bantuan pemerintah.<sup>61</sup>

#### D. Penelitian Terdahulu

1. Luluk Aryani susilaningtyas, Strategi Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam melalui Manajemen Pembiayaan (studi kasus pada MI Negeri Ambarawa), Hasil Penelitiannya yaitu: Pertama: Strategi manajemen pembiayaan pendidikan dalam peningkatan mutu guru, yaitu menekankan pada profesionalisme dan disiplin, serta komitmen tugas untuk meningkatkan mutu

<sup>60</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002),293

<sup>61</sup>JSIT Indonesia, *Standar Mutu Sekolah Islam Terpadu*, (Jakarta: JSIT Indonesia,2010), 145

sekolah. Kedua: Strategi manajemen pembiayaan pendidikan dalam upaya pembinaan siswa dilakukan melalui pembinaan di bidang seni, olahraga, keagamaan, pramuka, bahasa Inggris, dan kepribadian. Keempat: Strategi manajemen pembiayaan pendidikan dalam bidang sarana dan prasarana dilakukan dengan memperbanyak sumber pembiayaan, menjalankan program peningkatan mutu untuk mendukung sarana dan prasarana serta kesejahteraan guru.<sup>62</sup>

2. Sutrimo Purnomo, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembiayaan Pendidikan ( Studi kasus di Taman Pendidikan Al Quran Al Ittihad Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas). Temuan-temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pola partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad bersifat fungsional religius kultural dengan tahapan pembiayaannya, meliputi: *Pertama*, perencanaan pembiayaan pendidikan dilakukan dengan tahapan analisis permasalahan, analisis potensi, dan analisis kepentingan masyarakat yang berasaskan musyawarah untuk mufakat. *Kedua*, pelaksanaan pembiayaan pendidikan dilakukan melalui penggerakan sumber daya dan dana, kegiatan administrasi dan koordinasi, serta penjabaran program dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. *Ketiga*, evaluasi pembiayaan pendidikan dilakukan dengan melakukan perbandingan antara rencana anggaran belanja dan realisasi penggunaannya dengan prinsip transparansi anggaran.<sup>63</sup>
3. Suhadi, Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada Pondok Pesantren An Nur Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang. Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Proses

---

<sup>62</sup>Luluk Aryaniisusilaningtyas, Strategi Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam melalui Manajemen Pembiayaan (studi kasus pada MI Negeri Ambarawa), *Tesis*, IAIN Salatiga, 2015

<sup>63</sup> Sutrimo Purnomo, Partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan ( Studi kasus di Taman Pendidikan Al Quran Al Ittihad Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas), *Tesis*, IAIN Purwokerto, 2017

penganggaran Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren An Nur melibatkan Pengasuh Pondok, Pengurus Pondok, Dewan *Asatid* (Pengajar) dan Bendahara Pondok dan dilaksanakan pada awal bulan syawal. Dalam musyawarah peserta menyusun draf anggaran kemudian pengurus minta persetujuan Pengasuh Pondok Pesantren. 2. Proses pembukuan pembiayaan pendidikan di Pondok Pesantren An Nur, masing-masing ketua kelas melaporkan ke bendahara pondok pengeluaran dan pemasukan. Dalam proses ini dilaksanakan pada akhir tiap-tiap bulan. Setelah rekap pembukuan selesai maka disahkan oleh pengasuh pondok, kepala pondok dan bendahara pondok. 3. Sistem Evaluasi Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren An Nur tidak terjadwal secara pasti dalam 1 bulan dalam kegiatan majelis syahriah. 4. Faktor pendukung yang ada diantaranya: pembayaran syahriah yang lancar, kerja sama dengan dermawan dan kebijakan pemerintah tentang pembiayaan pendidikan untuk pondok pesantren sedangkan faktor penghambat berkenaan dengan alur pencairan dana dan keterlambatan pembayaran syahriah.<sup>64</sup>

4. Yul Khoerudin, Sistem Pembiayaan Pendidikan MI Maarif NU 01 Petahunan dan MI Maarif NU 01 Kranggan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Hasil penelitiannya adalah : 1. Pelaksanaan sistem pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Petahunan dan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Kranggan; secara administratif telah menunjukkan tata kelola keuangan yang positif, bahkan cenderung sistematis. 2. Sistem pembiayaan pendidikan madrasah yang diawali dari penganggaran (*budgeting*) benar-benar ditentukan berdasar pada hasil evaluasi tahun sebelumnya dan menerapkan skala prioritas dalam tiga jangka penggunaan; yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 3. Faktor pendukung

---

<sup>64</sup> Suhadi, Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada Pondok Pesantren An Nur Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang, *Tesis*, UNES, 2015

berjalannya sistem pembiayaan pendidikan baik di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Petahunan maupun Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Kranggan adalah sumber daya manusia yang ada di dalamnya secara kumulatif memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing.<sup>65</sup> Faktor penghambat dalam merealisasikan sistem pembiayaan pendidikan pada kedua madrasah ini adalah kurang responsifnya masyarakat (terutama orangtua siswa dan pihak lain) atas penggunaan anggaran madrasah. Pengawasan oleh masyarakat ini belum dapat dijalankan secara maksimal.<sup>65</sup>

5. Alam Nasrah, Implementasi Standar Pembiayaan Sekolah (Studi Evaluatif Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma). Hasil penelitiannya adalah: implementasi standar pembiayaan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma sudah terpenuhi dilihat dari ketersediaan alokasi biaya pengembangan pendidik, ketersediaan alokasi biaya penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ketersediaan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.<sup>66</sup>
6. Kisbiyanto, Pengefektifan Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Hasil Penelitiannya adalah: Pembiayaan pendidikan sebagai salah satu faktor penting penyelenggaraan pendidikan memerlukan analisis yang cermat dan tepat sehingga pengelolaan pendidikan bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif. Efisiensi anggaran terletak pada ketepatan analisis dan penggunaannya semaksimal mungkin bagi kepentingan pendidikan. Efektifitas anggaran terletak pada besarnya

---

<sup>65</sup>Yul Khoerudin, Sistem Pembiayaan Pendidikan MI Maarif NU 01 Petahunan dan MI Maarif NU 01 Kranggan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, *Tesis*, IAIN Purwokerto, 2016

<sup>66</sup>Alam Nasrah, Implementasi Standar Pembiayaan Sekolah (Studi Evaluatif Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma), *Tesis*, FKIP Univrsitas Bengkulu, 2013

capaian tujuan pendidikan yang didukung oleh penggunaan anggaran pendidikan.<sup>67</sup>

7. Ferdy W.P, *Financing Of Education a Theoritical Study*. Hasil kajian menunjukkan bahwa: 1) faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan, antara lain: a) kenaikan harga; b) perubahan gaji guru; c) perubahan populasi dan kenaikan prosentasi anak di sekolah negeri; d) meningkatnya standar pendidikan; e) meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah; f) meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi; g) adanya keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan; dan h) belum ada model pembiayaan yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam operasionalisasi biaya pendidikan; 2) jenis-jenis biaya pendidikan meliputi: a) biaya langsung; b) biaya tidak langsung; c) biaya pribadi; d) biaya masyarakat; e) monetary cost; dan f) non monetary cost; dan 3) model pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien yaitu model human capital di mana aspek pembiayaan dapat mempengaruhi taraf produktivitas yang dapat mempengaruhi taraf pendapatan seseorang atau kelompok sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.<sup>68</sup>
8. Budi Budaya, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada Sekolah Dasar yang efektif*. Hasil penelitian ini adalah: 1. Pelaksanaan dalam merencanakan anggaran pendapatan dan belanja sekolah yaitu: Perumusan penyusunan pembiayaan sekolah yang dalam hal ini RAPBS dilakukan melalui analisis kebutuhan operasional sekolah, baik yang terkait pada penyelenggaraan proses belajar mengajar maupun penunjang lainnya yang berpedoman kepada visi, misi, tujuan dan strategi yang telah dicanangkan oleh sekolah,

---

<sup>67</sup> Kisbiyanto, Pengefektifan Manajemen Pembiayaan Pendidikan, *Jurnal Elemntary*, VOL.2 No.1 Januari- Juni 2014.

<sup>68</sup>Ferdy W.P, *Financing Of Education a Theoritical Study*, Puslitjak, Balitbang, Kemendikbud, 2013

yaitu kepala sekolah, guru (pendidik) dan tenaga kependidikan. 2. Pelaksanaan dalam mengupayakan pendapatan dan mengatur belanja sekolah yaitu: Pembiayaan pendidikan yang ada di sekolah diupayakan dengan memanfaatkan sumber dana dari pemerintah daerah, yayasan dan dari masyarakat. Strategi yang ditempuh sekolah untuk menggalang pendanaan dari masyarakat melalui wali murid dan dunia usaha. 3. Pelaksanaan dalam melakukan evaluasi terhadap pendapatan dan belanja sekolah yaitu: Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh sekolah secara rutin baik tiap semester maupun tahun pelajaran dan Setiap personel sekolah diwajibkan untuk memberikan komentar dan masukan setiap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran sekolah. 4. Pelaksanaan dalam melakukan pertanggungjawaban terhadap pendapatan dan belanja sekolah yaitu: Bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dilakukan pihak sekolah antara lain menyusun laporan akhir program yang diberikan kepada seluruh warga sekolah dan stakeholder-nya serta laporan pemanfaatan pembiayaan yang berorientasi akuntabilitas dan transparansi.<sup>69</sup>

9. Ahmad Munir, Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam, hasil penelitiannya adalah: Pembiayaan pendidikan pada dasarnya menitikberatkan pada upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa. Pembiayaan pendidikan berhubungan dengan distribusi beban pajak dalam berbagai jenis pajak kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah. Hal yang sangat penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berupa besar uang yang harus dibelanjakan, dari

---

<sup>69</sup>Budi budaya, Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada Sekolah Dasar yang efektif, Likhitaprajna, *Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, ISSN: 1410-8771. Volume. 18, Nomor 1, 42-59

mana sumber uang yang diperoleh, dan kepada siapa uang harus dibelanjakan.<sup>70</sup>

10. Ulpha Lisni Azhari, Dedy Achmad Kurniady, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Fasilitas Pembelajaran, dan Mutu Sekolah. Hasilnya Penelitian: menunjukkan bahwa pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah secara bersama-sama memberikan pengaruh yang kuat dan signifikan. Berdasarkan temuan tersebut maka direkomendasikan untuk sekolah agar memperhatikan tahapan manajemen pembiayaan pendidikan terutama pada saat perencanaan dan pengawasan pembiayaan. Sedangkan pada prinsip pemanfaatan fasilitas perlu diperhatikan efisiensi terhadap penggunaan fasilitas pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan mutu sekolah.<sup>71</sup>

Penelitian ini apabila dibandingkan dengan penelitian yang sudah ada memiliki kesamaan, yaitu sama- sama meneliti masalah manajemen pembiayaan mulai dari penganggaran atau *budgeting* sampai dengan *controlling*. Namun penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang sudah ada. Perbedaannya yang pertama yaitu yayasan sebagai pengelola beberapa lembaga pendidikan. Kedua: lembaga pendidikan yang dikelola adalah lembaga pendidikan Islam terpadu. Ketiga: pengelolaan pembiayaan pendidikannya dikelola langsung oleh yayasan. Keempat: Yayasan memiliki amal usaha sebagai wadah penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

---

<sup>70</sup> Ahmad Munir, Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam, *Jurnal At-Ta'dib*, Vol. 8, No. 2, Desember 2013

<sup>71</sup> Ulpha Lisni Azhari, Dedy Achmad Kurniady, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Fasilitas Pembelajaran, *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol.XXIII No.2 Tahun 2016

## E. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran adalah diagram yang menjelaskan secara garis besar alur berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (research question) dan mempresentasikan himpunan beberapa konsep serta hubungan antar konsep tersebut.<sup>72</sup>

Pembiayaan pendidikan merupakan suatu kegiatan yang penting dalam pengelolaan pendidikan. Sebelum membuat perencanaan pembiayaan pendidikan, yayasan melakukan analisis terhadap lingkungan, yaitu analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki yayasan serta tantangan dan peluang yang dihadapi.

Langkah selanjutnya yaitu menetapkan dan merumuskan arah dan tujuan pendidikan, yang diimplementasikan melalui fungsi manajemen: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian serta sistem pembiayaan. Dalam kegiatan perencanaan ada penganggaran atau budgeting dengan model dan metode yang sesuai dengan sumber daya alam maupun manusia yang dimilikinya. Dalam fungsi *actuating* ada pelaksanaan pendidikan dan pembukuannya atau *accounting*. Sedang dalam kegiatan pengawasan ada kegiatan *auditing*.

Apabila semua kegiatan manajerial yang didalamnya ada sistem keuangan, dan bisa dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan anggaran pendapatan dan biaya sekolah maka akan tercapai tujuan yaitu meningkatnya kualitas proses pendidikan. Apabila proses pendidikan yang diberikan oleh yayasan sesuai dengan visi dan misinya maka tujuan lembaga pendidikan maupun yayasan akan tercapai. Yaitu meningkatnya kualitas pendidikan.

---

<sup>72</sup> Yaya Suryana, *Metode Penelitian Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 113

Bagan 2.1  
Kerangka Berpikir  
Sistem Manajemen Pembiayaan  
di Yayasan Pengembangan Ummat (YPU) Sidik Pati

